

Republik Maluku Selatan



Pernyataan Pemerintah Republik Maluku Selatan

Peningkatan kampanye rahasia melawan RMS

Beberapa waktu terakhir ini, kami telah melihat peningkatan kampanye rahasia di berbagai tingkat melawan RMS, melawan pemerintah RMS dan lebih khusus lagi terhadap presiden RMS, Mr. J.G. Wattilete. Pertarungan melawan RMS ini datang dari luar maupun dari dalam. Karena itu, hanya untuk kali ini, pemerintah RMS ingin menjelaskan pendapatnya terhadap kampanye-kampanye seperti ini.

Ketakutan Republik Indonesia terhadap kesadaran (politik) di Maluku

- Jenis kampanye ini sendiri bukanlah hal baru: selama RMS ada, kampanye ini akan dijalankan. Bedanya dengan sekarang, perjuangan RMS pada saat ini sedang dalam fase baru dan berbahaya bagi Indonesia. Bagaimanapun: kesadaran di antara bangsa Maluku tentang ketidakadilan, kebohongan, perampasan ekonomi dan penindasan yang dilakukan oleh pendjajah Indonesia terhadap mereka telah bertumbuh dan tidak dapat lagi ditekan. Ketidakpuasan dan perlawanan di antara bangsa Maluku tentang hal ini semakin meningkat. Bangsa Maluku sudah tidak lagi menerimanja, dan penindas dari Jakarta tahu itu.
- Kemungkinan bahwa bangsa Maluku pada suatu saat akan mulai bergerak dan akan melihat dan menerima bahwa RMS adalah alternatif yang terbaik sekali lebih besar dari sebelumnya. Terlebih lagi karena pemerintah Indonesia menjadari fakta bahwa kedudukan hukum internasional RMS sebagai suatu Negara kuat dan oleh karena itu posisinya dapat dipengaruhi oleh kegiatan pemerintah RMS saat ini dan yang akan datang.

Beberapa tjontoh adalah sebagai berikut:

- *Tuntutan terhadap Republik Indonesia oleh RMS atas kewadjibannya untuk pikul tanggundjawab penuh setjara hukum atas segala akibat buruk dari aneksasi dan pendudukannya setjara ilegal dari territorium RMS yang berlangsung saat ini;*
- *Kampanye (hukum) menentang pelanggaran hak asasi manusia oleh Indonesia yang berlangsung terus-menerus di Maluku dan*
- *Menantang perdjandjian CEPA antara UE dan Indonesia, dan lobi internasional yang terkait dengannya. .*

Republik Maluku Selatan



Beberapa tjonto tentang kampanye untuk memerangi RMS:

- *Makar*

Tjonto upaja menekan kebangkitan RMS dapat dilihat di pihak Indonesia dalam tindakan keras terhadap aktivis RMS.

Semua ini dilakukan atas dasar hukum jang tidak benar, jaitu tuduhan pendukung RMS melakukan "*makar*": jaitu melakukan penjerangan terhadap negara Indonesia dengan mengibarkan bendera nasional RMS.

Sudah djelas bahwa setiap negara konstitusional jang menghargai diri sendiri tidak dapat setjara wadjar menafsirkan pengibaran bendera nasional sebagai serangan terhadap keamanan negara. Namun demikian, pengadilan Indonesia, jang melanggar perdjanjian internasional, mendjatuhkan hukuman tahanan tanpa sjarat jang berat. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengintimidasi dan mentjegah para aktivis RMS lainnja.

- *Kampanje kotor di Media Sosial*

Selain itu, pemberitaan jang seringkali muntjul di Media Sosial di mana pemerintah di pengasingan Republik Maluku Selatan, serta presiden Republik Maluku Selatan, sengadja disorot. Tjontonja adalah publikasi foto dengan presiden mr. J.G. Wattilete dan mantan Panglima TNI di Maluku dengan pangkat mayor jenderal, kini menjadi Kepala Badan Bantuan Bencana Nasional Indonesia. Ada beberapa para pendukung jang sebutkan diri mereka katanja mereka djuga RMS, turut berpartisipasi dalam hal ini. Lalu ada, misalnja, klip video dari dalam lingkaran mereka sendiri jang mempertanyakan integritas presiden Maluku Selatan melalui sindiran dan tuduhan palsu jang terbukti tidak berdasar. Kritik dan tuduhan jang bukan tentang masalah sebenarnja. Baik setjara eksternal maupun internal, djelas terlihat serangan terkoordinasi jang bertudjuan untuk melemahkan status pemerintahan RMS, dan khususnja status presiden RMS. Kampanje ini dipimpin oleh alias "**Haluan Madju**" dan "**Maria Pessy**". Mereka didukung oleh beberapa "simpatisan" dari kalangan mereka sendiri.

Atas kritik dan tudingan dari kalangan kami sendiri berlaku satu prinsip penting bahwa, setiap orang boleh dan bisa punja pendapat tersendiri tentang bidjaksana perdjjuangan RMS, presiden RMS, dan anggota pemerintahan lain di pengasingan. Namun perlu sekali disadari bahwa kritik dan tudingan tersebut haruslah benar setjara faktual. Ini tidak njata atau tidak dimembuktikan.

Republik Maluku Selatan



Oleh karena itu, ini kampanye-kampanye seperti ini harus dianggap setjara murni kampanye-kampanye jang kotor.

Beberapa pendukung RMS turut merusak RMS

Selain itu, kritik jang tidak berdasar kepada pemerintah RMS berarti akan merusak RMS. Mengapa? Berikut adalah penjelasan pemerintah RMS.

Pada tahun 2011, atas nama pemerintah RMS, dua orang ahli di bidang hukum internasional - termasuk Dr. De Brabandere - membuat opini hukum tentang keberadaan dan kelanjutan keberadaan RMS.

Kesimpulan dari kedua ahli tersebut adalah bahwa menurut kaidah hukum internasional, RMS tetap eksis sebagai sebuah Negara mulai tanggal 25 April 1950 sampai hingga saat ini. Kelangsungan eksistensi ini sebagian besar disebabkan oleh kehadiran pemerintah RMS di pengasingan; sebagai penerus hukum pemerintah RMS, sebagaimana diproklamer pada tanggal 25 April 1950. Memang pada tempatnja saudara H. Apituley SH selaku saksi ahli dalam persidangan para aktivis FKM, setjara tegas menyatakan bahwa pemerintahan Republik Maluku Selatan jang sah berada di bawah dipimpin mr. J.G. Wattilete dan saat ini berada di pengasingan di Belanda.

Sedjak tahun 1966 dan seterusnya, kami telah mengalami di negeri Belanda bahwa berbagai matjam organisasi politik RMS - begitupun djuga beberapa pemerintah kontra - telah didirikan dan kemudian lenjap lagi. Satu-satunja faktor konstan dalam perdjjuangan RMS sedjak tahun 1966 adalah hanja pemerintah RMS jang untuk sementara terpaksa harus berdomisili di pengasingan.

Djika pemerintah di pengasingan ini tidak dibentuk pada tahun 1966 - dan sampai hingga saat ini tidak mewakili RMS sebagai perwakilannja jang sah - maka dari perspektif hukum internasional keberadaan **Negara "Republik Maluku Selatan"** sebagai entitas teritorial akan berakhir setjara definitif.

RMS kemudian disamakan dengan "**gerakan separatis**", sebagaimana yang telah diupayakan bertahun-tahun oleh Republik Indonesia dalam propaganda mereka tanpa hasil. Bendera RMS kemudian tidak lagi merupakan bendera nasional **Negara** Republik Maluku Selatan, tetapi dianggap bendera gerakan separatis. Sesederhana itu soal ini!

Republik Maluku Selatan



Ini djuga mendjelaskan mengapa Indonesia - dan mereka jang membiarkan dirinja dimanfaatkan oleh Indonesia - melakukan segala upaja untuk merugikan pemerintah RMS dan khususnja presiden RMS. Sedjalan dengan itu, telah ternjata satu upaja rahasia pemerintah Belanda jang terdapat dalam tjatatan konfidensial Menteri Luar Negeri Uri Rosenthal jang terbotjor, agar supaja RMS jang diwakili oleh pemerintah di pengasingan di bawah kepemimpinan Presiden J.G. Wattilete, mendapat terlarang akses dihadapan pengadilan di Belanda.

Sajang sekali, pada tahun 2020, masih ada orang jang tidak melihat atau memahami hal ini. Dalam "ketidaktahuan" mereka, mereka menghantjurkan RMS jang mereka katakan sangat mereka tjintai.

Dialog satu sama lain tidak bisa dihindari

Sehubungan dengan foto tersebut dari presiden RMS dengan Mayjen RI, perlu diingat bahwa tjara jang terbaik untuk menemukan solusi jang bertahan dan saling memuaskan atas konflik antara RMS dan Republik Indonesia adalah melalui dialog, dan bukan perdjjuangan bersendjata jang akan mengambil njawa di kedua sisi jang tidak di inginkan.

Jadi RI dan RMS harus berbitjara satu sama lain, apakah mereka mau atau tidak. Itu adalah kebiasaan politik internasional jang umum.

Pada tahun 2020, konflik internasional antar-negara - bahkan antara musuh politik terbesar - akan berakhir dengan atau tanpa tjampur tangan PBB melalui dialog. Mereka jang tidak mau atau tidak bisa melihat ini tidak memahami realitas politik internasional.

Sedjak tahun 1960-an upaja untuk sekali-kali berdialog antara RMS dan RI pernah terdjadi di bawah kempimpinan Manusama, Tutuhatunewa dan sekarang kabinet Wattilete. Ini bukan hal jang baru. Pemerintah RMS sendiri sebelumnja telah memberitakan hal ini setjara terbuka kepada publik dalam madjalah *Mena Muria* dengan foto dari dua perwakilan RMS bersama Dubes RI Mohammad Jusuf dan stafnja.

Pada tahun 2018, Dubes RI untuk UE di Brussel djuga meminta kepada UNPO untuk mendjadi mediasi dalam mendjalin pembijtaraan antara dirinja dengan pemerintah RMS. Pembijtaraan antara delegasi jang ditundjuk oleh pemerintah RMS - dipimpin oleh tuan Umar Santi dalam kapasitasnja sebagai Menteri Luar Negeri RMS - dan Duta Besar Indonesia untuk UE berlangsung pada tahun 2018.

Republik Maluku Selatan



Demi kedjelasan: Presiden RMS sendiri tidak hadir pada pertemuan tersebut, namun tentunya bertanggungjawab penuh atas pertemuan tersebut.

Mengapa, apalagi sekarang, pertemuan antara presiden dan wakil pemerintah Indonesia tiba-tiba sengadja diperbesar dan sengadja ditempatkan dalam sudut pandang negatif? Siapa dan apa di balik ini? Metode propaganda ini, yang dilengkapi dengan teks-teks jang menjesatkan dan mendjurus melalui foto, gambar video dan artikel di media, tidak lain mempunyai tudjuan untuk mengalihkan kita dari pertanyaan-pertanyaan njata jang penting:

- *Setjara bagaimana kita dapat membentuk dan mendukung perdjjuangan kita di Tanah Air terhadap aneksasi dan pendudukan ilegal dari territorium Maluku dan terhadap perdjjuangan kita di Pasifik dan bidang internasional dengan lebih baik?*
- *Mengapa Maluku masih menempati urutan teratas dalam daftar provinsi termiskin dengan sumber daja mineral jang begitu banjak?*

Masa depan Maluku patut mendapat perhatian serius. Waktu dan energi kita dapat diinvestasikan dengan lebih baik untuk masalah jang disebutkan di atas.

Indonesia serta beberapa segmen di lingkaran kita sendiri ternjata sangat mahir bermain dengan massa dengan tjara jang litjik. Pada masa sekarang kami menjebutkan ini berita palsu (HOAX). Pemerintah RMS berseru: Jangan djatuh ke dalam perangkap ini.

- Pada tanggal 25 April 2020, berbagai bendera RMS dikibarkan di Maluku, dimana segala bentuk aksi solidaritas di Belanda dilakukan sebagai tanggapannya, termasuk di KBRI di Den Haag. Kaum muda khususnya sekarang bergerak;
- Aksi solidaritas bersama dari Atjeh, Papua dan Maluku djuga sedang berlangsung;
- Selain itu, ada diskusi jang djauh lebih terbuka di Maluku apakah masih ada ruang untuk Maluku didalam NKRI;
- Pengadilan terhadap para tersangka, jang diadili sebagai separatist karena melakukan apa jang disebut "Makar" - serangan terhadap keamanan Negara - mendapat banjak perhatian di media dan dari organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Human Rights Watch;
- Di Maluku, ketakutan publik makin hari makin meningkat bahwa rakjat Maluku hanja penonton, sedangkan keputusan tentang distribusi sumber daja Maluku jang adalah milik mereka berada di luar lingkaran pengaruh mereka;
- Tidak diragukan lagi Indonesia sekarang telah mengetahui kegiatan pemerintah RMS jang sedang berlangsung dan jang akan datang.

Republik Maluku Selatan



Inilah perkembangan-perkembangan jang sangat mengkhawatirkan Indonesia. Mereka harus mengambil tindakan untuk ini. Ini selalu terdjadi, tetapi sekarang tindakannja meningkat dengan serangan balasan ini dengan mendjelekkkan dan meminggirkan perdjjuangan RMS.

Pertama-tama, marilah kita berhenti berpartisipasi dalam permainan propaganda kotor Indonesia ini dan permainan kotor oleh mereka jang disebut sebagai “kritikus” didalam lingkungan kita sendiri. Dengan ini kami memberikan ruang kepada Indonesia untuk mengadudombakan kita satu sama jang lain.

Pemerintah RMS tidak akan djatuh kedalam perangkap ini dan meminta basaudara untuk djuga tidak terpengharu dengan permainan mereka. Ia akan terus fokus tanpa gangguan pada masalah njata di Maluku jang dari hari ke hari semakin besar dan serius.

Marilah kita landjutkan setjara bersama perdjjuangan kemerdekaan kita tanpa merasa terganggu!!

Terimalah salam nasional kita:

Mena – Muria!!

Pemerintah di pengasingan

Republik Maluku Selatan,

presiden

mr.J.G.Wattilete